

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN TAGIHAN UANG PENGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

(Dedi Eka Putra, NIM. 1320119021, 2015, 126 halaman)

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu parah dan meluas dalam masyarakat dan sangat memprihatinkan. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi kuantitas, kualitas serta jumlah kerugian keuangan negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian tagihan uang pengganti pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?. (2) Bagaimana upaya Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian tagihan uang pengganti pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat yuridis sosiologis (*socio-legal research*), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di tengah masyarakat dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian dengan bahan hukum primer dan subsidair serta tersier. Dasar perundang-undangan korupsi yang dikaji adalah UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 16 Tahun 2004 dan UU No. 8 Tahun 1981. Hasil penelitian diketahui bahwa peran jaksa dalam penyelesaian tagihan uang pengganti belum maksimal, aparat kejaksaan belum menjalankan tugas dan kewenangannya karena Jaksa Penuntut Umum belum menyerahkan salinan berkas acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara sehingga gugatan perdata tidak dapat dilakukan. Kedua, hambatan yang dihadapi aparat kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi diantaranya: kurangnya kordinasi antara aparat kejaksaan, belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan tentang hukum formil/hukum acara gugatan perdata mengenai pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, batasan waktu lamanya penyelesaian proses perkara tindak pidana korupsi bagi aparat. Upaya yang perlu dilakukan dalam penyelesaian tunggakan uang pengganti yaitu : Penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana dan ahli warisnya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui putusan subsider pidana penjara, melalui gugatan perdata dan administrasi keuangan.

Kata Kunci : Jaksa, Penagihan, Uang Pengganti dan Korupsi

THE ROLE OF THE STATE ATTORNEY ATTORNEY IN LIEU OF MONEY CLAIMS SETTLEMENT CORRUPTION ATTORNEY AT HIGH WEST SUMATRA

(Dedi Eka Putra, NIM, 1320119021, 2015, 126 pages)

ABSTRACT

Corruption in Indonesia has been so severe and widespread in the community and very alarming. Development continues to increase from year to year, both in terms of quantity, quality and the amount of financial loss to the state. The research problems are (1) How the state attorney's role in the settlement of compensation bill on jurisdiction in the High Court of West Sumatra ?. (2) How State Attorney efforts in the settlement of bills for such compensation in the High Court jurisdiction in West Sumatra? The approach used in this study is the legal research juridical sociological (socio-legal research), which approaches the problem through legal research by looking at the legal norms in force and relate to the fact that there is in the community with the problem formulated in the study with the primary legal materials and subsidiary and tertiary. Basic legislation is corruption studied Law 31 Year 1999 jo Law No. 20 In 2001, Law No. 16 of 2004 and Law No. 8 Year 1981. The results reveal that the prosecutor's role in the settlement of bills for such compensation is not maximized, prosecutors apparatus is not performing its duties and authority because the Prosecution had not submitted a copy of the file of proceedings to the state attorney so that a civil action can not be performed. Second, the barriers faced by prosecutors in an attempt to rescue the country's financial result of corruption include: the lack of coordination among prosecutors, has not been specifically regulated in law on formal legal / procedural law, civil lawsuit regarding the return of state financial in consequence of corruption, restrictions the length of time the settlement process corruption cases to the authorities. Efforts need to be made in the settlement of arrears of compensation are: Seizure and auction property belonging to the convicted person and his heirs after a court decision has permanent legal force, through subsidiary imprisonment verdict, through civil action and financial administration.

Keywords: Attorney, Billing, Money Substitutes and Corruption

